

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH PENDUDUK
DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi**



Disusun Oleh:

Mochammad Dewa Pratama Putra
18011010155/FEB/EP

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

2023

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH PENDUDUK
DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK**

Yang disusun Oleh:

Nama : Mochammad Dewa Pratama Putra
NIM : 18011010155
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S-1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh tim Penguji Skripsi:

Pada tanggal 2023

Dosen Pembimbing

Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan,

Dr. Dra. Ec. Ririt Iriani, M.E., Ak.
NIP. 196502081990022001

Riko Setya Wijaya, SE, MM
NIP. 18119800105073

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

Dr. Dra. Ec. Tri Kartika P. M.Si. CRP
NIP. 196304201991032001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang tertandatangani dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mochammad Dewa Pratama Putra

NPM : 18011010155

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ni tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Surabaya,

Mochammad Dewa Pratama Putra

18011010097

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana ekonomi pada Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Jawa Timur.

Sehubungan dengan selesainya karya akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing ibu Dr. Dra. Ec. Ririt Iriani, M.E., Ak. Yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, serta memberikan masukan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT sebagai Rektor UPN Veteran Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Dra. Ec. Tri Kartika P. M.Si. CRP sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur.
3. Bapak Riko Setya Wijaya, SE, MM sebagai Ketua Program Studi Sarjana ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Ririt Iriana Sri Setiawati, S.E, Ak, M.E selaku dosen pembimbing

5. Orang tua yang telah memberikan dukungan secara moral, materi, serta doa sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Seluruh kawan-kawan mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman yang sangat berharga bagi saya yaitu Bayu Anggoro Jati, Ahadi Akbar Fajri, Aldhi Herlando dan Mahendra Agus Adi Pramana.
9. Kekasih yaitu Kanaya Norin Swantana yang telah menjadi pendamping dan moodbosster dalam menyusun skripsi ini.
10. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 10 Februari 2023

Penulis

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH PENDUDUK
DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK**

Mochammad Dewa Pratama Putra

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran”
Jawa Timur

Email: 18011010155@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil menggunakan kepustakaan di BPS Kabupaten Gresik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi berganda, yang dimana pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tingkat kemiskinan dan secara simultan pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji t dan F yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, JUMLAH PENDUDUK
DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK**

Mochammad Dewa Pratama Putra

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran”
Jawa Timur

Email: 18011010155@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine whether government spending, population and unemployment rate affect poverty rate in Gresik Regency. This study uses secondary data taken from the library at BPS Gresik Regency. Data analysis in this study used quantitative methods and multiple regression analysis, in which the results of this study showed that government spending had a positive and significant effect on poverty rate, population had a negative and significant effect on poverty rate, and unemployment rate had no effect on poverty growth and simultaneously spending government, population and unemployment rate have a significant effect on poverty rate in Gresik Regency. This was proven by the results of the t and F tests conducted in this study.

Keywords: *Government Expenditures, Population, Unemployment Rate, Poverty Rate*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Ruang Lingkup.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Kemiskinan	7
2.1.1. Pengertian Tingkat Kemiskinan.....	7
2.1.2. Teori Kemiskinan.....	9
2.1.3. Jenis dan Ukuran Kemiskinan	12
2.1.4 Faktor Penyebab Kemiskinan	14
2.2. Pengeluaran Pemerintah	15
2.2.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	15
2.2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.2.3. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah	19
2.2.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan ...	20
2.3. Jumlah Penduduk.....	21
2.3.1. Pengertian Jumlah Penduduk.....	21
2.3.2. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan	23
2.4. Tingkat Pengangguran	24
2.4.1. Pengertian Tingkat Pengangguran	24
2.4.2. Jenis-jenis Pengangguran	25
2.4.3. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	26
2.5. Penelitian Terdahulu	28

2.5. Kerangka Pikir.....	31
2.6. Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1. Pendekatan Penelitian	33
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.2.1. Tempat Penelitian	33
3.2.2. Waktu Penelitian.....	33
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	34
3.3.1. Variabel Terikat	34
3.3.2. Variabel Bebas	34
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5. Metode Analisis.....	35
3.6. Uji Asumsi Klasik	36
3.7. Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	42
4.2. Deskripsi Data	42
4.2.1. Tingkat Kemiskinan	42
4.2.2. Pengeluaran Pemerintah	44
4.2.3. Jumlah Penduduk	46
4.2.4. Tingkat Pengangguran.....	47
4.3. Hasil Analisis	49
4.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	49
4.4. Pengujian Hipotesis	52
4.4.1. Analisis Regresi	52
4.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)	53
4.4.3. Uji F.....	54
4.4.4. Uji t.....	55
4.5. Pembahasan.....	57
4.5.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik	58
4.5.2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik	59

4.5.3. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir	31
3.1 Kurva DW	37
4.1 Kurva DW Test.....	52
4.2 Kurva Distribusi F	55
4.3 Kurva Distribusi t Pengeluaran Pemerintah	55
4.4 Kurva Distribusi t Jumlah Penduduk	57
4.5 Kurva Distribusi t Pengangguran.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020	43
Tabel 4.2 Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020	46
Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020.....	48
Tabel 4.5 Uji Normalitas	49
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas (Glejser)	51
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.9 Uji F.....	54
Tabel 4.10 Uji t Parsial	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Variabel Penelitian.....	66
Lampiran 2: Hasil Olah Data.....	67
Lampiran 3: Tabel Distribusi F dengan $\alpha = 0,05$	69
Lampiran 4: Tabel Distribusi t	69
Lampiran 5: Tabel Durbin-Watson dengan $\alpha = 5\%$	70

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan ialah salah satu perkara yang tidak pernah luput dari kepedulian pemerintah sesuatu negeri dibelahan dunia manapun. Kemiskinan apalagi jadi perkara fenomenal dalam bidang ekonomi yang jadi titik acuan keberhasilan pemerintah sesuatu negeri dari waktu ke waktu, terlebih pada wilayah yang lagi tumbuh.

(Haughton, Shahidur R dan Khandker, 2012) berpendapat bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan dipengaruhi berbagai hal yang saling berkaitan.

Angka tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Gresik terjadi pada tahun 2011 sebesar 15,33%, sedangkan angka tingkat kemiskinan terendah di Kabupaten Gresik terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,09%. Dari tahun ke tahun angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu 15,33% sampai tahun 2020 yaitu 11,09%

Kondisi kemiskinan yang terjadi didasari oleh ketidakmampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi permasalahan kemiskinan mereka dan bisa juga terjadi akibat kurang maksimalnya program pemerintah dalam memberikan bantuan pengkulangan kemiskinan (Haughton, Shahidur R dan Khandker, 2012)

Peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menjadi tidak miskin sangat penting. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan), kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. (Mangkoesobroto, 1993) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu fungsi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada fungsi tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah, dalam konteks kebijakan fiskal, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan

Menurut Nelson dan Leibstein dikutip dari (Sukirno, 2010) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di Negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat

tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah penduduk adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja. Sehingga, terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya.

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Jika tidak maka akan terjadi pengangguran dan berdampak buruk dengan berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemakmuran yang berimbas kepada kemiskinan. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik yang telah dibangun di wilayah kabupaten Gresik. Seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan industri ini dibarengi juga dengan menurunnya angka tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di kabupaten Gresik. Namun realitanya angka tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di kabupaten Gresik masih cukup tinggi bila dibandingkan

dengan daerah lain, pasalnya kota Gresik adalah kota industri yang semestinya memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan bisa dijangkau oleh masyarakat kabupaten Gresik sendiri sehingga sumber daya manusia dapat tertampung dan digunakan dengan baik. Faktanya angka tingkat pengangguran di kabupaten Gresik masih dalam angka yang cukup tinggi yakni mencapai puluhan ribu orang. Tingginya angka tingkat pengangguran di kabupaten Gresik ini berhubungan dengan tingginya angka tingkat kemiskinan di kabupaten Gresik karena banyaknya tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan. Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tentunya akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya terlebih lagi jika memiliki banyak beban tanggungan dalam keluarganya. Menurut data, tercatat sebanyak 168 ribu warga miskin di kabupaten Gresik. Jumlah ini masih tergolong cukup tinggi yaitu sekitar 12,89 persen dari hampir 1,4 juta jiwa penduduk di kabupaten Gresik. Tingginya angka tingkat kemiskinan ini menunjukkan ukuran kesejahteraan masyarakat yang dinilai dalam tingkatan yang tergolong rendah.

Penulis memilih penelitian di Kabupaten Gresik dikarenakan beberapa tahun belakangan ini daerah Kabupaten Gresik banyak mengalami perubahan terutama dalam sisi pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu menyebabkan penulis tertarik memilih daerah tersebut untuk melakukan penelitian. Sehingga diharapkan pembangunan di daerah Kabupaten Gresik dapat memberikan dampak yang besar terhadap sektor-sektor lain begitu pula dengan Tingkat Kemiskinan yang seharusnya dapat di minimumkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan adanya rumusan masalah diatas, maka dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.

1.4. Ruang Lingkup

Pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya diimbangi oleh minimnya tingkat kemiskinan. Penelitian ini difokuskan dengan melibatkan variable pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Periode tahun yang digunakan adalah tahun 2006 sampai tahun 2020 atau selama 15 tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Gresik.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup atau pembahasan yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Pengertian Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang

layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2006).

Walaupun permasalahan kemiskinan ini sudah jadi sorotan serta bahan dialog pada bermacam forum, baik pada tingkatan nasional serta internasional tetapi secara realistis dapat dikira kemiskinan itu tidak sempat bisa dientaskan malah kemiskinan/ poverty cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Kenyataan menampilkan pembangunan yang sudah dicoba belum sanggup meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Diperkirakan terdapat yang kurang pas dalam mamahami serta merumuskan dan implementasi kebijakan buat memberantas kemiskinan serta memberdayakan penduduk miskin.

Sepanjang ini kemiskinan lebih kerap berhubungan dengan ukuran ekonomi sebab ukuran inilah yang sangat gampang diamati, diukur, serta diperbandingkan. Sementara itu kemiskinan berkaitan pula dengan bermacam ukuran yang lain, antara lain ukuran sosial, budaya, sosial politik, area (alam serta geografis), kesehatan, pembelajaran, agama, serta budi pekerti.

2.1.2. Teori Kemiskinan

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kemiskinan diantaranya adalah:

- a. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse. Menurut Ragnar Nurkse, teori Lingkaran Setan Kemiskinan menjelaskan bahwa Negara-negara sedang berkembang itu miskin, karena produktivitasnya rendah, yang mengakibatkan penghasilan penduduk rendah, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minimum sehingga tidak dapat menabung (tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat).
- b. Teori Perangkap Kemiskinan oleh Malthus Teori Malthus, menunjukkan bahwa suatu saat pertumbuhan jumlah penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan. Ketika keadaan ini terjadi akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin (Agung dan Saputro, 2007).
- c. Menurut Yacoub, dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan

menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.

- d. Menurut World Bank, salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.
- e. Menurut Adisasmita, indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Agung dan Saputro, 2007).
- f. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

- g. Menurut teori Bank Dunia pada tahun 2007 menggunakan ukuran US\$ 2-PPP (*purchasing power parity*) kapita/hari, yaitu ukuran kemiskinan yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan standar Bank Dunia, ternyata secara empiris sering menjelaskan fenomena kemiskinan. Terutama, membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank Dunia didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bahan masakan. Karakteristik ekonomi kelompok penduduk miskin, yaitu perpaduan tingkat pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan yang tidak merata akan menghasilkan kemiskinan mutlak yang parah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu jaminan bahwa tingkat kemiskinan itu akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi gagal dalam menciptakan pemerataan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu saja, mereka yang bekerja di sektor industri pada teknologi, sektor keuangan

(perbankan), dan sektor pemerintah tidak akan menciptakan lapangan bagi masyarakat miskin. Sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak menjangkau masyarakat miskin. Akibatnya pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak mampu menolong keluarga miskin keluar dari kondisi kemiskinan. Juga ada faktor dari masyarakat itu sendiri walaupun pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk bisa lebih maju dalam berkarya.

2.1.3. Jenis dan Ukuran Kemiskinan

Berdasarkan aset penyebab kemiskinan, terdapat tiga jenis kemiskinan yaitu (Baswir, 1997):

1. Kemiskinan natural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumberdaya manusia maupun sumber daya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.
2. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk

memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.

3. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Menurut (Suryawati, 2005), kemiskinan diukur berdasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun yang dibagi menurut wilayah pedesaan dan perkotaan.

Ukuran kemiskinan di daerah pedesaan apabila:

1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.
3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Ukuran kemiskinan di daerah perkotaan apabila:

1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

2.1.4 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut (Siagian, 2012), terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. Faktor Internal. Faktor berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk kurang mampuan, yang meliputi: fisik, intelektual, mental emosional atau temperamental, spritual, sosial psikologis, keterampilan dan aset.
2. Faktor Eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi: terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit, tandus, dan terpencil, serta kebijakan publik yang belum berpihak pada masyarakat miskin.

Sedangkan penyebab kemiskinan menurut (BKPK dan Semeru, 2001)

suara orang miskin yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan pendapatan, modal, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk: modal sumber daya manusia, misalnya pendidikan formal, keterampilan, dan kesehatan yang memadai, modal produksi, misalnya lahan dan akses terhadap kredit, modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap kebijakan dan keputusan politik, sarana fisik, misalnya akses

terhadap prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan hidup di daerah yang terpencil.

2. Kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi goncangan-goncangan karena: krisis ekonomi, kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan, kehilangan pekerjaan (PHK), konflik sosial dan politik, korban kekerasan sosial dan rumah tangga, bencana alam (longsor, gempa bumi, perubahan iklim global), serta musibah seperti jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang wabah penyakit).
3. Tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena, tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari kejahatan, kesewenang-wenangan aparat, ancaman dan intimidasi, kebijakan publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

2.2. Pengeluaran Pemerintah

2.2.1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan publik, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau

wilayah (Sukirno, 2011). Tujuan dari kebijakan public ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Landau dalam (Yunianto, 2011) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang militer dan pendidikan berkorelasi negative terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara untuk pendidikan sendiri berkorelasi kuat dan investasi pemerintah berkorelasi positif tetapi tidak signifikan. Lin dalam (Fatimah dan Setyowati, 2007) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil.

Lin juga menyatakan bahwa Hukum Wagner hanya berlaku untuk negara maju. Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan. Melalui anggaran rutin, khususnya

belanja rutin pegawai yang berupa gaji pegawai, pemerintah dapat mendorong perekonomian melalui konsumsi masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-Propinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir-proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi Lee Robert et al., dalam (Yunianto, 2011).

2.2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran adalah sebagai berikut:

- a) Teori Adolf Wagner Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wegner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wegner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.
- b) Teori Peacock dan Wiseman Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

- c) Teori Musgrave dan Rostow Musgrave berpendapat bahwa dalam proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap 30 GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua program pelayanan kesehatan masyarakat.
- d) Teori Lotto dan Al Shatti yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Abu dan Abdullahi bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah tersebut tidak dibelanjakan pada sektor yang berdampak multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur fisik, antara lain jalan tol, pelabuhan, transportasi, dan telekomunikasi sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut dapat memperlancar arus perdagangan dan meningkatkan investor asing. Struktur pengeluaran pemerintah Indonesia lebih banyak difokuskan pada transfer pembiayaan langsung dari pemerintah pusat ke masyarakat bukan pada pembelanjaan untuk keperluan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan pemerintah harus memperhatikan siklus ekonomi (*business cycle*). Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami resesi maka pengeluaran pemerintah

harus bersifat ekspansif, sedangkan apabila kondisi perekonomian sedang membaik (*recovery*) maka pengeluaran pemerintah hendaknya bersifat kontraksif.

2.2.3. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Menurut (Ahman dan Epi, 2007) Adapun pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota:

A. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi

1) Belanja

- a) Belanja operasional yaitu pembelanjaan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Yang termasuk dalam belanja operasional ini yaitu meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya.
- b) Belanja modal terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya.
- c) Belanja tak terduga yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2) Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

- a) Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota.
- b) Bagi hasil restribusi ke Desa/Kabupaten.
- c) Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota

- 3) Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembiayaan pinjaman
 - b) Penyertaan modal
 - c) Pemberian pinjaman jangka panjang

2.2.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat

Kemiskinan

Permasalahan pembangunan yang terjadi menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat diatasi. Campur tangan pemerintah yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah yang menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal selain pajak. Faktor penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang tujuannya untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran pemerintah ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan. Sehingga, dari hal ini bisa dikenal kalau instrumen kebijakan fiskal pemerintah lewat pengeluaran pemerintah diharapkan bisa menolong menghasilkan lapangan pekerjaan yang

berakibat pada pengurangan pengangguran serta tingkatkan pemasukan dan kesejahteraan penduduk sehingga bisa mengurangi kemiskinan.

2.3. Jumlah Penduduk

2.3.1. Pengertian Jumlah Penduduk

1. Menurut kaum Klasik, pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan apalagi dalam jumlah yang besar yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian penduduk dianggap sebagai beban pembangunan.
2. Menurut (BPS Kabupaten Gresik, 2019) bahwa Jumlah penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama sebulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
3. Menurut Tambunan, dari sisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan asset yang penting bagi produksi. Di lain segi jumlah penduduk merupakan faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah.
4. Menurut Maier dikutip dari Mudrajat Kuncoro, dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun

juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan:

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
 - b) Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.
5. Teori Adam Smith menyatakan bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa. Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya pertumbuhan penduduk. Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan terdapat penambahan output dan penambahan hasil.
 6. Menurut Nelson dan Leibstein terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di

negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

2.3.2. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Nelson dan Leibstein terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin (Sukirno, 2012)

Perkembangan penduduk yang tinggi selanjutnya menghambat negara berkembang untuk mencapai salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi, yaitu pemerataan pendapatan (Sukirno, 2007). Pertambahan penduduk yang tinggi bakal menimbulkan jurang yang telah terdapat di antara sebagian kalangan warga jadi meningkat lebar. Pertama, di satu pihak pengangguran yang sangat besar jumlahnya cenderung buat mempertahankan tingkatan upah pekerja tidak terdidik pada tingkatan upah yang sangat rendah. Kedua, pertambahan penduduk di wilayah pertanian memunculkan pengangguran terselubung yang lebih sungguh- sungguh serta kondisi ini hendak menimbulkan pemasukan rata- rata petani miskin jadi rendah. Pada waktu yang sama, sebab perbandingan antara tanah serta penduduk sudah meningkat kecil, hingga sewa tanah hendak hadapi peningkatan. Ini cuma hendak menaikkan pemasukan para petani kaya. Serta ketiga, kekurangan peluang

kerja di desa- desa memperderas arus urbanisasi kota- kota besar serta perihal ini memunculkan perkembangan kota yang sangat kilat. Akibat lanjut dari kondisi ini harga tanah, rumah serta sewa rumah naik dengan kilat.

2.4. Tingkat Pengangguran

2.4.1. Pengertian Tingkat Pengangguran

Menurut Sukimo (2011), pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran (Unemployment) merupakan masalah yang hampir selalu ada dalam setiap perekonomian, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran merujuk pada situasi dimana seseorang harus dihadapkan dengan keadaan ketiadaan kesempatan kerja.

Hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja dipertanian yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak

pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya seperti banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh perhari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka masih tetap miskin (Arsyad, 2014).

2.4.2. Jenis-jenis Pengangguran

1. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

a. Pengangguran Normal.Friksional

Pengangguran Normal/Friksional adalah terdapatnya pengangguran yang terjadi dalam suatu ekonomi sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja dimana ekonomi sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh.

b. Pengangguran Siklikal Pengangguran

Siklikal adalah pengangguran yang terjadi akibat menurunnya permintaan agregat yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya.

c. Pengangguran Struktural

Adalah pengangguran yang terjadi akibat dari perubahan struktur kegiatan ekonomi dalam suatu negara tertentu seperti wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi dan lain sebagainya.

d. Pengangguran Teknologi

Adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi sehingga terjadinya pergantian tenaga manusia dengan teknologi yang menyebabkan banyak pengurangan tenaga kerja.

2. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

a. Pengangguran Terbuka

Adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja yang mengakibatkan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan dalam suatu perekonomian.

b. Pengangguran Tersembunyi

Adalah kelebihan jumlah pekerja dalam suatu kegiatan perekonomian dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien

c. Pengangguran Bermusim

Adalah pengangguran yang sering terjadi pada sektor pertanian dan perikanan dimana pekerjaan hanya dilakukan pada musim tertentu.

d. Setengah Menganggur

Adalah para pekerja yang belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja pada paruh waktu tertentu.

2.4.3. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat

Kemiskinan

Permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah penduduk adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan

kerja. Sehingga, terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Masyarakat yang berada di dalam kondisi tidak bekerja (menganggur) maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan di dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan penduduk menggapai maksimum apabila keadaan tingkatan pemakaian tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Bila tidak maka akan terjadi pengangguran serta berakibat buruk dengan berkurangnya tingkatan pemasukan warga sehingga hendak mengurangi tingkatan kemakmuran yang berefek kepada kemiskinan (Sukirno, 2017).

Hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas (Arsyad, 2016). Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.

(Octaviani, 2001) mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan

sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode, Tujuan dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ahmad Nainunis Al-Muhaimin (2019)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran, Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap, Kemiskinan Di Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis linier berganda • Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik • Jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan menggunakan variabel terikat dan variabel bebas yang sama
2.	Anjas Pasaribu (2019)	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Tingkat Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis data panel • Tujuannya untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan tingkat Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017. • Hasil penelitian berdasarkan uji t diketahui bahwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan menggunakan variabel terikat yang sama • Perbedaan ruang lingkup yang digunakan

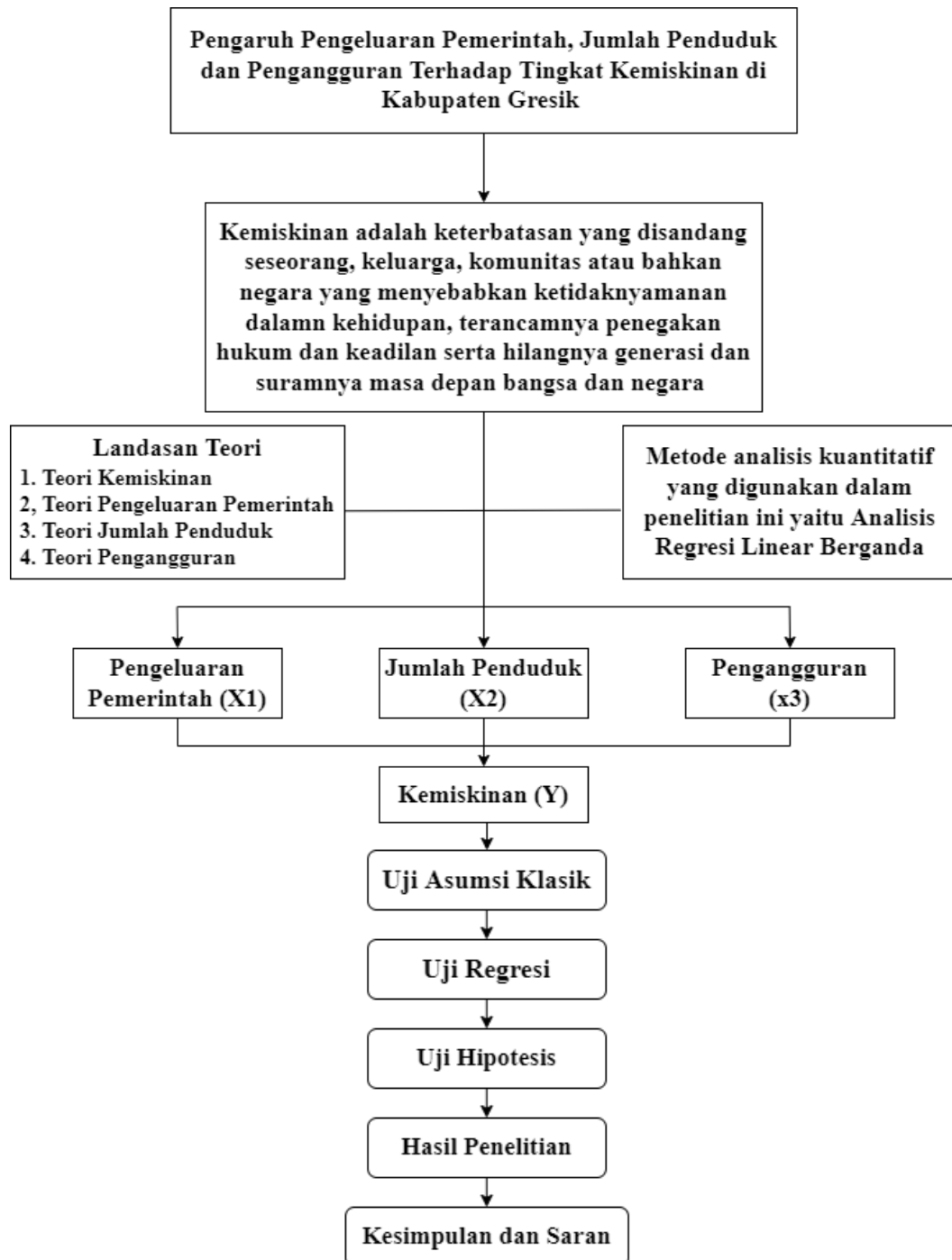
			variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dan variabel pengangguran juga tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan.	
3.	Sundari Rahma Sari Putri (2019)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1990-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis liner berganda • Tujuannya untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap tingkat Kemiskinan di Indoneia tahun 1990-2018. • Jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1990-2018. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan menggunakan variable terikat yang sama • Perbedaan ruang lingkup yang digunakan
4.	Kartika Berliani (2021)	Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ttingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis linier berganda • Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. • Hasil penelitian menunjukkan secara parsial semua variabel baik variabel tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan menggunakan variable tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sama • Perbedaan ruang lingkup yang berbeda

			pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020	
5.	Hanifiatus Shofi Wardani (2021)	Pengeluaran Pemerintah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis data panel • Tujuannya untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), Pengeluaran Pemerintah, dan Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2015-2019. • Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan menggunakan variable pengeluaran pemerintah dan kemiskinan yang sama • Perbedaan ruang lingkup yang berbeda

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.5. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, di mana keadaan masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul, berdasarkan rumusan masalah diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1 : Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
2. H2 : Diduga jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
3. H3 : Diduga tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih yang dalam proses pelaksanaan penelitiannya banyak menggunakan angka-angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai pada hasil atau penarikan kesimpulan (Machali, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang di ambil merupakan data dalam bentuk angka yang akan di gunakan untuk menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Kabupaten Gresik yang di ambil menurut dokumentasi data yang di dapat melalui publikasi Badan Pusat Statistik.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan pada penelitian mulai dari 25 Januari 2023 s/d selesai dengan menggunakan data time series yang di ambil melalui publikasi Badan Pusat Statistik.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi Operasional adalah mendefinisikan konsep yang akan dioperasionalkan pada suatu penelitian dalam bentuk variabel, baik berdasarkan teori maupun data secara empiris dengan tujuan untuk menjelaskan dan menerangkan beberapa variabel, baik variabel terikat (*Dependent Variable*), dan variabel bebas (*Independent Variable*).

3.3.1. Variabel Terikat

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu Tingkat Kemiskinan (Y). Dalam penelitian ini menggunakan data tingkat kemiskinan kabupaten Gresik tahun 2006-2020.

3.3.2. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang tidak mempengaruhi variabel terikat (*Dependent Variable*). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas:

1. Pengeluaran Pemerintah (X1)

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk Daerah. Indikator pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah jumlah pengeluaran pemerintah dalam satuan rupiah yang diambil dari BPS Gresik mulai dari tahun 2006-2020.

2. Jumlah Penduduk (X2)

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Indikator jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan jiwa tahun 2006-2020 yang datanya diperoleh dari BPS Gresik.

3. Tingkat Pengangguran (X3)

Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah persentase angkatan kerja yang saat ini menganggur. Indikator pengangguran dalam penelitian ini adalah jumlah pengangguran di Indonesia dalam satuan persen selama tahun 2006-2020 yang diperoleh dari BPS Gresik.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Data kuantitatif terdiri dari data pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip dilanjutkan dengan pencatatan dan perhitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik).

3.5. Metode Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah model regresi linier berganda. Regresi linear berganda yaitu hubungan secara linear antara dua atau

lebih variabel bebas atau independen ($X_1, X_2, X_3 \dots X_n$) dengan variabel terikat atau dependen (Y). Uji analisis ini digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini pengeluaran pemerintah (X_1), jumlah penduduk (X_2), dan tingkat pengangguran (X_3) dengan variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan (Y). Semua variabel tersebut dapat dirangkum dalam suatu hubungan fungsional.

Dalam mengestimasi model regresi linier berganda dapat dilakukan menggunakan uji diantaranya uji autokorelasi, multikolerasi, heteroskedastisitas, uji normalitas, uji T, uji F dan uji koefisien determinan.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

β_0 = Dugaan bagi parameter konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Dugaan bagi parameter $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

X_1, X_2, X_3 = Variabel Independen

e = error term

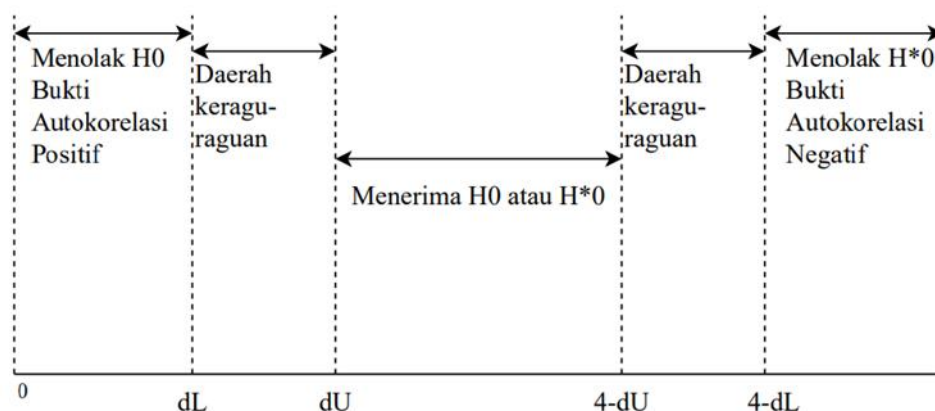
3.6. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2013) uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara kesalahan pada satu pengamatan dengan kesalahan pada pengamatan sebelumnya sebelum menggunakan model regresi. Ada masalah autokorelasi jika ada korelasi antara pengamatan dalam deret waktu. Jika data tidak mengandung autokorelasi, maka

dinyatakan memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Durbin Watson dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada data yang ada. Berdasarkan uji coba, data tersebut memiliki autokorelasi atau tidak termasuk autokorelasi berdasarkan asumsi sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kurva DW



1. Autokorelasi positif, jika:

- $DW < dL$, maka terdapat autokorelasi positif.
- $DW > dU$, maka tidak terdapat autokorelasi positif.
- $dL < DW < dU$, maka pengujian tidak dapat disimpulkan.

2. Autokorelasi Negatif, jika:

- $(4 - DW) > dL$, maka terdapat autokorelasi negatif.
- $(4 - DW) > dU$, maka tidak terdapat autokorelasi negatif.
- $dL < (4 - DW) < dU$, maka pengujian tidak dapat disimpulkan.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali, tujuan dari uji multikolinearitas ini adalah untuk melihat apakah setiap variabel bebas berhubungan secara linier atau berkorelasi satu sama lain. Jika tidak terdapat multikolinearitas, model regresi dinyatakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Multikolinearitas dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya adalah perhitungan nilai VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Asumsi berikut dapat digunakan untuk menentukan apakah data penelitian memiliki multikolinearitas atau tidak:

- a. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0,1, data dianggap terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 maka data dianggap tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastias

Menurut Imam (Ghozali, 2016) uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki keragaman kesalahan yang sama atau tidak. Homoskedastisitas mengacu pada asumsi varians kesalahan yang sama, sedangkan heteroskedastisitas terjadi ketika variasi nilai kesalahan tidak konstan atau beragam. Nilai error untuk setiap observasi harus konstan untuk memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Jika data setelah pengujian dilaporkan memiliki heteroskedastisitas, tetapi ada penyimpangan dari

persyaratan asumsi klasik, seperti kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), model regresi mungkin tidak boleh memiliki heteroskedastisitas. Uji Glejser merupakan salah satu pengujian yang dapat menemukan heteroskedastisitas. Asumsi berikut dapat digunakan untuk menentukan apakah data menunjukkan heteroskedastisitas atau tidak: di ganti metode scatter plot.

- a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
- b. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4) Uji Normalitas

Menurut Imam (Ghozali, 2018), tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu data dari variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal. Dalam penelitian ini digunakan uji dengan analisis statistik yaitu uji Shapiro Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data dinyatakan terdistribusi normal maka lolos uji normalitas dan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) pada uji Shapiro Wilk. Uji Shapiro Wilk digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi teratur atau tidak. Hal ini didasarkan pada asumsi berikut:

- a. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila pada ahasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai signigikan lebih besar dari 0.05.
- b. Data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal apabila pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikan kurang dari 0.05.

3.7. Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi

Menurut Imam (Ghozali, 2013b) koefisien determinasi (R^2) adalah metrik yang mengukur seberapa jauh model dapat menjelaskan varians dari variabel dependen. Ini berkisar dari nol hingga satu. Angka R^2 menunjukkan seberapa besar variasi total variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel penjelas. Semakin besar fraksi dan fluktuasi total variabel dependen yang dapat dideskripsikan oleh variabel independen, semakin tinggi nilai R^2 . Angka yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk meramalkan fluktuasi variabel terikat.

2) Uji Parsial (Uji t)

Menurut Imam Ghozali uji signifikansi parameter individu (uji t) digunakan untuk menentukan seberapa besar varians dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh satu variabel dependen saja. Pengujian dilakukan dengan menggunakan ambang batas signifikansi 0,05 (=5%). Berikut ini adalah prosedur untuk menerima atau menolak hipotesis:

- a. H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai signifikansi $t > 0,05$.
(koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen.

- b. H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai signifikansi $t < 0,05$. (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen.

3) Uji Simultan (Uji F)

Menurut Imam Ghozali uji F adalah uji signifikansi matematis yang menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bila digunakan bersama-sama.

- a. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan (*Pemerintah Kabupaten Gresik, 2020*).

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang tidak dapat dipahami hanya sebagai kurangnya kekayaan, penghasilan dan materi seperti sandang, papan dan sebagainya. Namun, kemiskinan seharusnya dapat dipandang secara kompleks,

yakni selain unsur kurangnya kekayaan, penghasilan dan materi, juga kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan sosial. Tidak terpenuhinya kebutuhan sosial ini misalnya tidak adanya kemampuan atau daya berpartisipasi dalam masyarakat.

Berikut ini data tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik:

Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020

Tahun	Kemiskinan (Persen)	Perkembangan (Persen)
2006	25,19	-
2007	23,98	-1,21
2008	21,43	-2,55
2009	19,14	-2,29
2010	16,42	-2,72
2011	15,33	-1,09
2012	14,30	-1,03
2013	13,89	-0,41
2014	13,41	-0,48
2015	13,63	0,22
2016	13,19	-0,44
2017	12,80	-0,39
2018	11,89	-0,91
2019	11,35	-0,54
2020	11,09	-0,26

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa presentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang awalnya pada tahun 2006 mencapai 25,19% lalu mengalami penurunan secara terus menerus yang signifikan sampai dengan tahun 2020 yaitu 11,09% atau mengalami penurunan sebanyak 14,10%. Hal ini membuktikan dalam kurun waktu 15 tahun tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik dapat diatasi dengan baik. Selain itu peran pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan juga baik yaitu dengan

pemberdayaan UMKM dan mendirikan banyak lapangan pekerjaan bagi para pengangguran.

4.2.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah mempunyai suatu kebijakan yang diterapkan dengan tujuan tertentu demi terciptanya bentuk pelayanan kepada masyarakat yang baik. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu adanya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah daerah adalah pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menunjang berjalannya pemerintahan. Peranan pengeluaran pemerintah daerah dalam wujud pembangunan sarana prasarana yang ditujukan masyarakat akan menunjang kegiatan perekonomian lebih baik, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dengan demikian meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan pendapatan bai daerah. Berikut ini data pengeluaran pemerintah di Kabupaten Gresik:

Tabel 4.2 Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	Perkembangan (Persen)
2006	760.689.435	-
2007	860.980.768	13,18
2008	980.789.678	13,92
2009	1.130.679.789	15,28
2010	1.569.789.600	38,84
2011	1.227.690.560	-21,79
2012	1.474.710.987	20,12
2013	1.810.430.460	22,77
2014	2.200.520.980	21,55
2015	2.565.145.670	16,57
2016	2.933.657.908	14,37
2017	2.964.601.670	1,05
2018	2.983.145.490	0,63
2019	3.128.645.700	4,88
2020	3.414.640.678	9,14

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa angka pengeluaran pemerintah di Kabupaten Gresik setiap tahunnya mulai dari tahun 2006-2020 selalu mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2006 yaitu 760.689.435 Miliar. lalu terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2020 yaitu 3.414.640.678 Miliar. Pengeluaran ini tentunya digunakan oleh pemerintah pada setiap periodenya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan yang berdampak kepada pengurangan tingkat kemiskinan.

4.2.3. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang bermukim di suatu wilayah yang berperan sangat penting dalam proses pembangunan wilayah tersebut, sekaligus menjadi sasaran menikmati hasil pembangunan wilayah tersebut. Penduduk yang berkualitas dan produktif merupakan tujuan utama tercapainya pembangunan manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika pembangunan difokuskan pada kualitas manusia, maka akan tercapai pembangunan masyarakat yang lebih merata dan taraf hidup yang lebih sejahtera. Dengan demikian, potensi penduduk dan sumber Daya Manusia (SDM) yang ada berkualitas dan optimal agar perannya dalam pembangunan dan sosial masyarakat cenderung meningkat. Berikut ini data Jumlah penduduk di Kabupaten Gresik:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (Persen)
2006	1.107.370	-
2007	1.125.336	1,62
2008	1.143.592	1,60
2009	1.162.146	1,59
2010	1.180.900	1,61
2011	1.196.516	1,32
2012	1.211.686	1,27
2013	1.227.101	1,27
2014	1.241.613	1,18
2015	1.256.313	1,18
2016	1.270.702	1,15
2017	1.285.018	1,13
2018	1.299.024	1,09
2019	1.312.881	1,07
2020	1.326.420	1,03

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022

Pada tabel 4.3 menunjukkan tren Jumlah penduduk di Kabupaten Gresik selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Gresik sebanyak 1.107.370 jiwa meningkat menjadi 1.326.420 jiwa jiwa pada tahun 2020.

4.2.4. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu masalah perekonomian yang perlu dicari solusinya, karena dengan menganggur maka seseorang tidak memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga yang ditanggung, perbandingan jumlah / persentase jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja sering disebut tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran merupakan suatu masalah perekonomian yang perlu dicari solusinya, karena dengan menganggur maka seseorang tidak memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga yang ditanggung, perbandingan jumlah / persentase jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja sering disebut tingkat pengangguran terbuka. Berikut ini data tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik:

Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020

Tahun	Pengangguran (Persen)	Perkembangan
2006	8,14%	-
2007	7,50%	-0,6%
2008	7,70%	0,2%
2009	5,93%	-1,8%
2010	6,78%	0,9%
2011	4,55%	-2,2%
2012	5,06%	0,5%
2013	5,67%	0,6%
2014	5,57%	-0,1%
2015	4,50%	-1,1%
2016	5,80%	1,3%
2017	5,50%	-0,3%
2018	5,80%	0,3%
2019	5,50%	-0,3%
2020	8,21%	2,7%

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa besarnya tingkat pengangguran mengalami kenaikan dan penurunan atau bisa disebut tidak stabil. Dari tahun 2006 menunjukkan angka 8.14% lalu pada tahun 2007 meningkat menjadi 7.50% dan pada tahun 2008 turun menjadi 7.70% lalu meningkat lagi pada tahun 2009 yaitu 5.93%. naik turunnya angka tingkat pengangguran ini membuktikan bahwa pemerintah masih belum baik dalam mengatasi tingkat pengangguran yang terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan pertambahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.

4.3. Hasil Analisis

4.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah model regresi linear yang digunakan terdapat masalah – masalah asumsi klasik. Model regresi mampu dikatakan baik apabila memenuhi asumsi-asumsi klasik yang dibagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu normalitas, multikolinearitas, dan heterokedasitas dan autokorelasi yang dapat di lihat sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Syarat pada uji normalitas ini jika data yang digunakan dapat dikatakan berdistribusi normal adalah apabila nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	715579493717,00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.131
	Negative	-.182
Test Statistic		.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan output SPSS tersebut, di peroleh nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov dari seluruh nilai residual data yang digunakan pada penelitian ini sebesar 0,195. Di karenakan nilai hasil Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian yang digunakan telah berdistribusi normal dan dapat asumsi normalitas telah terpenuhi.

b) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan korelasi yang terjadi antara variabel independen pada model regresi linier berganda. Syarat dalam Uji Multikolinearitas ini adalah apabila nilai dari tolerance lebih dari 0,1 dan nilai dari VIF kurang dari 10,00.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengeluaran Pemerintah	.247	4,047
	Jumlah Penduduk	.257	3,884
	Pengangguran	.861	1,161
a. Dependent Variable: Kemiskinan			

Berdasarkan output SPSS tersebut, dapat diketahui bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) pada masing-masing variabel lebih kecil dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas yang terjadi pada model regresi.

c) Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada Uji Heteroskedastisitas ini menggunakan Uji Glejser dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Adapun hasil uji heterokedasitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas (*Glejser*)

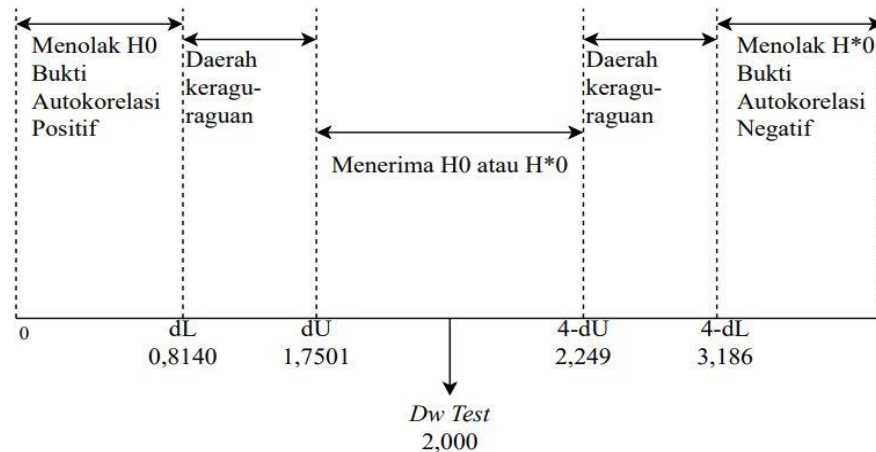
Variable	Sig.	Syarat	Keterangan
Pengeluaran Pemerintah	.456	> 0,05	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
Jumlah Penduduk	.312	> 0,05	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
Pengangguran	.604	> 0,05	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas

Berdasarkan output Uji glejser dari SPSS tersebut, dapat diketahui bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Hasil tersebut mampu menjelaskan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen nilai ABRESID, dikarenakan nilai signifikansi masing-masing variabel diatas 5% atau 0,05.

d) Uji Autokorelasi

Metode pengujian autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Durbin Watson (DW Test). Berdasarkan output SPSS 25 dapat diperoleh hasil DW test sebesar 2,000. Dengan k (jumlah variabel bebas) adalah 3 dan n (tahun) adalah 15, maka didapatkan nilai DW tabel yakni $dL = 0,8140$ dan $dU = 1,7501$.

Gambar 4.1 Kurva DW Test



4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan analisis tentang bentuk linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 25 maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1211966,431 + 48,606 - 6059,853 + 1654,554$$

Berdasarkan dari hasil persamaan linier berganda tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) $\beta_0 =$ Konstanta sebesar 1211966,431

Menunjukkan apabila Pengeluaran Pemerintah (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan Tingkat Pengangguran (X3) dianggap tetap maka tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik sebesar 1211966,431 %.

- 2) $\beta_1 =$ Koefisien regresi X1 sebesar 48,606

Angka tersebut menjelaskan bahwa, apabila variabel jumlah penduduk (X2) dan tingkat pengangguran (X3) dianggap tetap maka setiap pengeluaran

pemerintah meningkat satu satuan maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik akan meningkat sebesar 48,606 %.

3) $\beta_2 =$ Koefisien regresi X2 sebesar 6059,853

Angka tersebut menjelaskan bahwa, apabila variabel pengeluaran pemerintah (X1) dan tingkat pengangguran (X3) dianggap tetap maka setiap jumlah penduduk meningkat satu satuan maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik akan menurun sebesar 6059,853 %.

4) $\beta_3 =$ Koefisien regresi X3 sebesar 1654,554

Angka tersebut menjelaskan bahwa, apabila variabel pengeluaran pemerintah (X1) dan jumlah penduduk (X2) dianggap tetap atau konstan, maka setiap pengangguran meningkat satu satuan maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 3,048 persen.

4.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kontribusi regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk menilai koefisien determinasi dapat dilihat dari Output Model Summary. Untuk sebuah model regresi yang menggunakan dua bahkan lebih variabel independen maka dapat dilihat dari nilai Adjusted R square. Hal ini dikarenakan nilai Adjusted R square hanya akan meningkat jika variabel baru atau tambahan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam sebuah model regresi. sedangkan untuk R square akan selalu meningkat ketika jumlah variabel bertambah meskipun variabel baru tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi penelitian ini:

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b		
Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,989	0,987
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Pengangguran		
b. Dependent Variable: kemiskinan		

Hasil uji koefisien pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square pada model regresi penelitian ini yaitu sebesar 0,987. Hal ini membuktikan bahwa variabel yang terdiri dari Pengeluaran Pemerintah (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan Tingkat Pengangguran (X3) dapat menjelaskan variabel Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 98,7% dan sisanya sebesar 1,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.4.3. Uji F

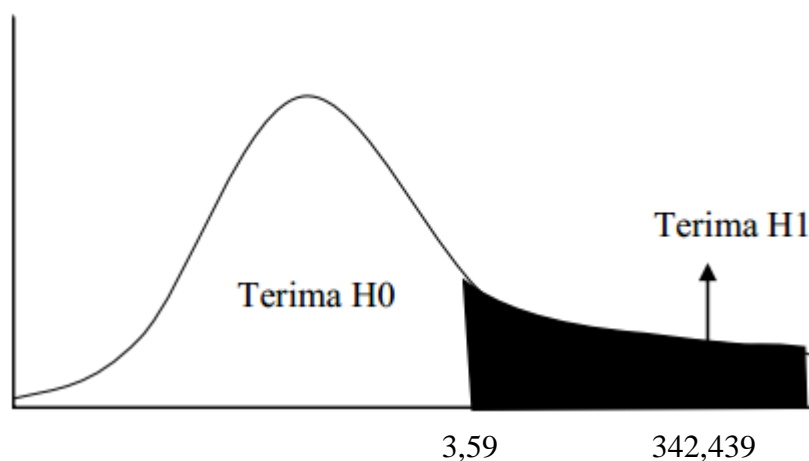
Uji signifikansi ini pada umumnya digunakan untuk membuktikan secara statistic apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji F (Anova)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66950832487,175	3	22316944162,392	342,439	.000 ^b
	Residual	716875616,559	11	65170510,596		
	Total	67667708103,733	14			
a. Dependent Variable: Kemiskinan						
b. Predictors: (Constant),Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Pengangguran						

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 342,439 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Diketahui nilai Ftabel ($\alpha = 0,05$) dengan degree of freedom (df1) yaitu 3 (banyak variabel bebas / k) dan nilai df2 yaitu 11 (n-k-1) maka diperoleh Ftabel sebesar 3,59. Sehingga dapat diketahui nilai F hitung $342,439 > F$ tabel 3,59 dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Hal tersebut juga dapat dilihat dari kurva berikut

Gambar 4.2 Kurva Distribusi F



4.4.4. Uji t

Tujuan dilakukannya uji t adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ukuran yang digunakan dalam uji t pada penelitian ini ialah dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan t hitung. Nilai sig ($\alpha = 0,025$) dengan degree of freedom (df) 11 (n-k-1) maka diperoleh t tabel sebesar 2,2009. Dari hasil analisis uji t dapat dilihat sebagai berikut:

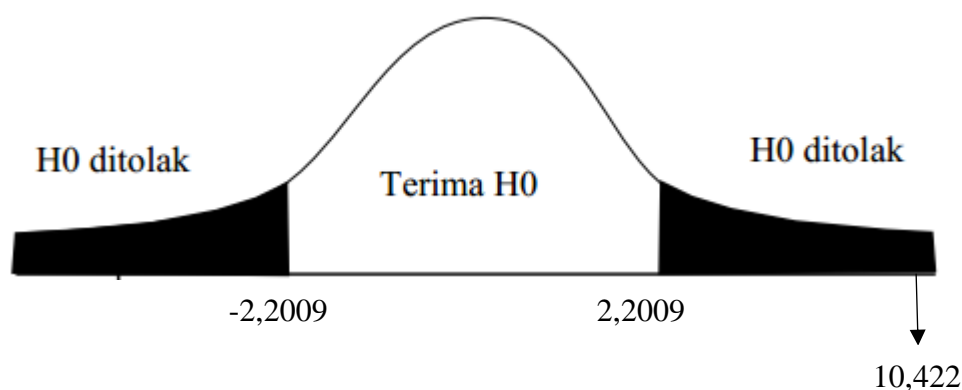
Tabel 4.10 Uji t Parsial

Model		t	sig.	t tabel
1	Pengeluaran Pemerintah	10,422	0,000	2,20099
	Jumlah Penduduk	-6,463	0,000	
	Pengangguran	1,448	0,176	

a) Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah t hitung sebesar $10,422 > t$ tabel $2,2009$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pengeluaran Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan (Y).

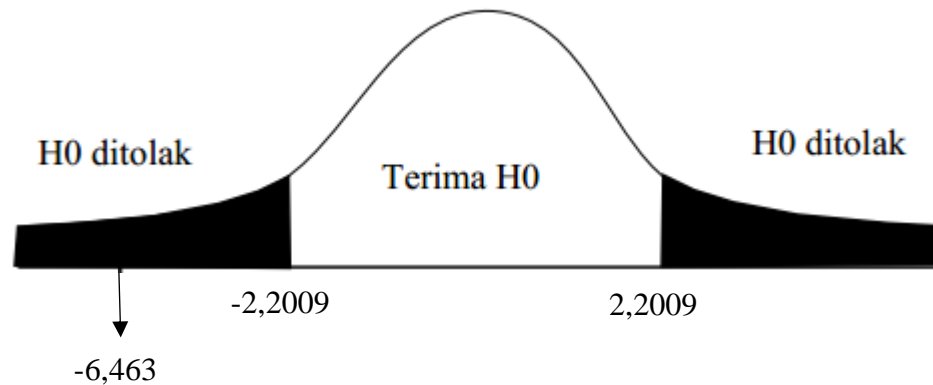
Gambar 4.3 Kurva Distribusi t Pengeluaran Pemerintah



b) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk t hitung sebesar $6,463 > t$ tabel $2,2009$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Jumlah Penduduk (X2) secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan (Y).

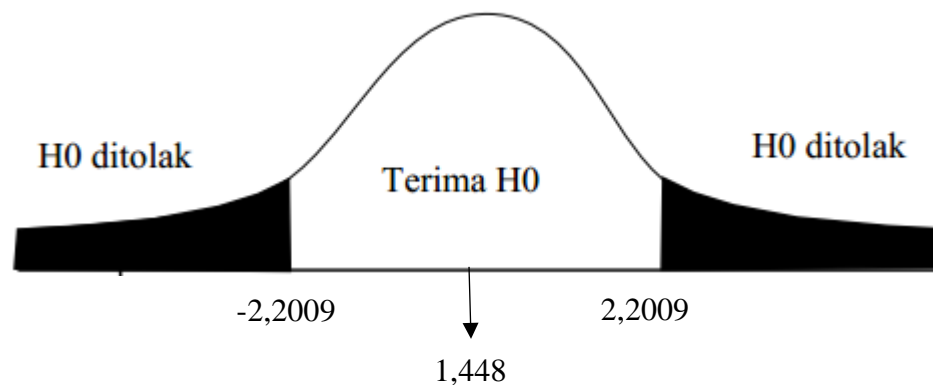
Gambar 4.4 Kurva Distribusi t Jumlah Penduduk



c) Pengangguran

Pengangguran t hitung sebesar $1,448 < t$ tabel $2,2009$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,176 > 0,05$. Sehingga diambil kesimpulan bahwa Pengangguran (X3) secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat Kemiskinan (Y).

Gambar 4.5 Kurva Distribusi t Pengangguran



4.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada pengujian secara parsial melalui uji t yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengaruh masing-masing variabel independen (pengeluaran

pemerintah, Jumlah penduduk dan tingkat pengangguran) terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan tidak semua variabel independen yang ada dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.5.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik

Variabel pengeluaran pemerintah pada tahun 2006-2020 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Artinya setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% setiap tahun akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1%

Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah harusnya berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi. Pengeluaran pemerintah salah satunya dilakukan untuk belanja infrastruktur, jika infrastruktur di suatu negara atau daerah sangat memadai akan mendorong para investor untuk berinvestasi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini bisa terjadi apabila pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak merata dan tidak digunakan untuk masyarakat sehingga pengeluaran pemerintah yang besar yang harusnya menurunkan tingkat kemiskinan justru menambah tingkat kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ahmad Nainunis Al_Muhaimin 2019) yang membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.5.2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik

Variabel Jumlah penduduk pada tahun 2006-2020 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah penduduk dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, Jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Artinya setiap peningkatan Jumlah penduduk sebesar 1% setiap tahun akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1%.

Hal ini disebabkan karena pada jumlah penduduk mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan justru mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila jumlah penduduk mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan. Hal ini yang menyebabkan jumlah penduduk berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. Dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik lebih di dominasi oleh usia usia produktif sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masih terbuka lebar. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka tingkat kemiskinan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai pemacu pembangunan sehingga akan mengerakkan berbagai macam

kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, yang mana menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Selanjutnya Menurut Whisnu Adhi Saputra (2011) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Saharuddin Dudi, Ferri Fauzi 2016) yang membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.5.3. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik

Variabel pengangguran pada tahun 2006-2020 tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil penelitian, pengangguran memiliki nilai koefisien regresi sebesar

0,176 ($0,176 > 0,05$). Artinya setiap peningkatan tingkat pengangguran tidak mempengaruhi peningkatan tingkat kemiskinan.

Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena tingkat pengangguran didominasi oleh pengangguran yang terdidik, orang yang menganggur tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhannya karena tidak semua orang menganggur selalu miskin, karena kelompok pengangguran terbuka sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal dan ada juga yang mempunyai usaha sendiri, serta ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Tingkat Kemiskinan tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan

Selain itu juga diperkuat dengan pendapat Lincolin (Arsyad, 2014) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Anjas Pasaribu 2020) yang membuktikan bahwa pengangguran tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, Jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik baik secara parsial. Dari analisis yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik.
2. Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik.
3. Tingkat Pengangguran tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran berikut untuk dapat dipertimbangkan:

1. Bagi peneliti selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik Tahun 2006-2020 agar lebih menggali lagi pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi pengeluaran

pemerintah, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan yang sudah dibuat dalam penelitian ini.

2. Bagi pemerintah Dari hasil yang diperoleh yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia, maka pemerintah harus berupaya meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, tentunya dengan diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat hutang.
3. Bagi masyarakat Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia, sehingga perlu adanya upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk misalnya dengan lebih mengencarkan program KB bagi masyarakat. Selain itu peningkatan jumlah penduduk perlu di bersamai dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan lain yang menunjang kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, G., Rochaida, E. dan Warsilan (2016) “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan manajemen*, 12(1).
- Agung, P.U. dan Saputro, E.S. (2007) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro di Lima Belas Provinsi Tahun 2017,” *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 6(2).
- Ahman, E. dan Epi, I. (2007) *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: PT. Grafindo Pratama.
- Arsyad, L. (2014) “Konsep dan pengukuran pembangunan ekonomi,” *Lincoln Arsyad*, hal. 1–46.
- Arsyad, L. (2016) *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Lima. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Baswir, R. (1997) *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- BKPK dan Semeru (2001) *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- BPS Kabupaten Gresik (2019) *Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2014-2018*. Tersedia pada: www.gresik.bps.go.id (Diakses: 21 Februari 2022).
- Fatimah, S.N. dan Setyowati, E. (2007) “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam negeri di Jawa Tengah tahun 1980-2002,” *Jurnal ekonomi Pembangunan*, 8(1), hal. 80–95.
- Ghozali, I. (2013a) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013b) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 7 ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haughton, J., Shahidur R dan Khandker (2012) *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and inequality)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Machali, I. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: MPI.
- Mangkoesebroto, G. (1993) *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Octaviani, D. (2001) “Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis indeks Forrester Greer & Horbecke,” *Media Ekonomi*, 7(100–118).
- Pemerintah Kabupaten Gresik* (2020). Tersedia pada: <https://gresikkab.go.id/> (Diakses: 29 Januari 2023).

- Siagian, M. (2012) *Kemiskinan dan Solusi*. Medan: Grasindo Monoratama.
- Sukirno, S. (2007) *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: P.T.Rajawali Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2010) *Makroekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: P.T.Rajawali Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011) *Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2012) *Makro EKonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali.
- Sukirno, S. (2016) *Makroekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: P.T.Rajawali Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2017) *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Suryawati, C. (2005) *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang: UNDIP PRESS.
- Yunianto, T. (2011) "Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nganjuk," *Thesis. Program pasca Sarjana* [Preprint].

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Variabel Penelitian

Tahun	Kemiskinan (Persen)	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)	Perkembangan (Persen)
2006	25,19%	2006	760.689.435	-
2007	23,98%	2007	860.980.768	13,2
2008	21,43%	2008	980.789.678	13,9
2009	19,14%	2009	1.130.679.789	15,3
2010	16,42%	2010	1.569.789.600	38,8
2011	15,33%	2011	1.227.690.560	- 21,8
2012	14,30%	2012	1.474.710.987	20,1
2013	13,89%	2013	1.810.430.460	22,8
2014	13,41%	2014	2.200.520.980	21,5
2015	13,63%	2015	2.565.145.670	16,6
2016	13,19%	2016	2.933.657.908	14,4
2017	12,80%	2017	2.964.601.670	1,1
2018	11,89%	2018	2.983.145.490	0,6
2019	11,35%	2019	3.128.645.700	4,9
2020	11,09%	2020	3.414.640.678	9,1

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022 Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (Persen)	Tahun	Pengangguran (Persen)
2006	1.107.370	1,62	2006	8,14%
2007	1.125.336	1,62	2007	7,50%
2008	1.143.592	1,62	2008	7,70%
2009	1.162.146	1,62	2009	5,93%
2010	1.180.900	1,61	2010	6,78%
2011	1.196.516	1,32	2011	4,55%
2012	1.211.686	1,27	2012	5,06%
2013	1.227.101	1,27	2013	5,67%
2014	1.241.613	1,18	2014	0
2015	1.256.313	1,18	2015	4,50%
2016	1.270.702	1,15	2016	5,80%
2017	1.285.018	1,13	2017	5,50%
2018	1.299.024	1,09	2018	5,80%
2019	1.312.881	1,07	2019	5,50%
2020	1.326.420	1,03	2020	8,21%

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022 Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2022

Lampiran 2: Hasil Olah Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	715579493717,00000000
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.131
	Negative	-.182
Test Statistic		.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengeluaran Pemerintah	.247	4,047
	Jumlah Penduduk	.257	3,884
	Pengangguran	.861	1,161
a. Dependent Variable: Kemiskinan			

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17598,192	16165,515		1,089	0,300
pengpe	-2,353	3,042	-0,442	-0,773	0,456
jmpend	-647,443	611,586	-0,592	-1,059	0,312
pengang	397,853	745,409	0,163	0,534	0,604
a. Dependent Variable: ABRESID					

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	0,989	0,987	8072,825	2,000
a. Predictors: (Constant), pengang, jmpend, pengpe					
b. Dependent Variable: kemis					

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66950832487,175	3	22316944162,392	342,439	.000 ^b
	Residual	716875616,559	11	65170510,596		
	Total	67667708103,733	14			
a. Dependent Variable: Kemiskinan						
b. Predictors: (Constant),Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Pengangguran						

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1211966,431	24782,632		48,904	0,000
	pengpe	48,606	4,664	0,651	10,422	0,000
	jmpend	-6059,853	937,595	-0,395	-6,463	0,000
	pengang	1654,554	1142,753	0,048	1,448	0,176
a. Dependent Variable: kemis						

Model Summary ^b		
Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,989	0,987
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Pengangguran		
b. Dependent Variable: kemiskinan		

Lampiran 3: Tabel Distribusi F dengan $\alpha = 0,05$

$\alpha = 0,05$	$df_1 = (k-1)$							
$df_2 = (n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.44 8	199,500	215.70 7	224,583	230,162	233.98 6	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641

Lampiran 4: Tabel Distribusi t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025
df	0.50	0.20	0.10	0.050
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037

Lampiran 5: Tabel Durbin-Watson dengan $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198